BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perdagangan satwa liar ilegal yang terjadi di Tiongkok mendapatkan beberapa pihak yang terlibat dalam konservasi perhatian khusus dari k<mark>ea</mark>nekaragaman hayati dikarena<mark>kan ak</mark>tivitas transnasionalnya. TRAFFIC ha<mark>di</mark>r dalam berupaya melakukan berbagai misi dan strategi untuk menanggulangi p<mark>erdagangan satwa liar ilegal terutama untuk spesies trenggiling di Tiongkok.</mark> TRAFFIC juga mengadvokasi beberapa mitra dari pihak swasta maupun p<mark>em</mark>erintah untuk turut ikut <mark>dala</mark>m upaya menekan angka eksploitasi satwa <mark>lia</mark>r ilegal seperti trenggiling. Upaya TRAFFIC berjejaring dengan pihak konservasi seperti dengan rezim CITES maupun mitra jejaring konservasi lainnya dalam menanggulangi perdagangan satwa liar ilegal ini menggunakan konsep Transnational Advocacy Network (TAN). Konsep TAN merupakan tulisan dari Keck dan Sikkink yang memuat empat tipologi yakninya information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics, dimana konsep ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh TRAFFIC dalam menanggulangi perdagangan satwa liar ilegal.

TRAFFIC melakukan upaya pendekatan dengan aktor-aktor di berbagai sektor lain seperti sektor bisnis, pemerintah, serta mitra-mitra yang juga bergerak dalam konservasi keanekaragaman hayati. TRAFFIC melakukan strategi information politics dengan upaya sharing dan publikasi untuk menunjukkan pentingnya kesadaran akan menjaga spesies yang terancam punah seperti trenggiling. Kemudian, TRAFFIC melakukan strategi symbolic politics yang dapat

menunjukkan urgensi trenggiling yang masuk dalam daftar merah spesies terancam punah dan melalui itu berupaya untuk mengadvokasi masyarakat global terutama Tiongkok untuk mengurangi konsumsi trenggiling. Untuk merealisasikan tujuan TRAFFIC dalam mengadvokasi masyarakat dan pelaku perdagangan satwa lair ilegal, TRAFFIC berupaya memberikan pengaruh dengan menjangkau pemerintah Tiongkok hingga melakukan pendekatan dengan cara turut hadir dalam konferensi Internasional mengenai kepedulian terhadap konservasi keanekaragaman hayati, upaya memberikan pengaruh kepada pihak yang lebih kuat ini disebut *leverage politics*.

Pada fase akhir dari strategi TRAFFIC yaitu accountability politics, dimana TRAFFIC sudah berada pada tahap mampu menjangkau dan memastikan bahwa TRAFFIC telah turut berupaya memberikan saran dan masukan terhadap tuntutan kepada para pelaku perdagangan satwa liar ilegal yang dibuktikan dengan kontribusi TRAFFIC dalam memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Tiongkok dan diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang mengenai pengaturan satwa liar oleh Pemerintah Tiongkok.

Upaya TRAFFIC dalam menanggulangi perdagangan satwa liar ilegal trenggiling di Tiongkok dapat dikatakan cukup berhasil. TRAFFIC Internasional berdasarkan mandatnya kepada TRAFFIC China memberikan dampak yang cukup signifikan dengan terciptanya sebuah advokasi untuk perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh TRAFFIC sebagai jaringan advokasi transnasional bagi perdagangan satwa liar

ilegal khususnya trenggiling di Tiongkok, diharapkan masyarakat Tiongkok maupun masyarakat global dapat peduli dan menjaga keanekaragaman hayati. Kemudian, pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap individu maupun kelompok pelaku kegiatan perdagangan satwa liar ilegal serta oknumoknum yang melakukan upaya eksploitasi terhadap satwa trenggiling di Tiongkok. Upaya tindakan yang tegas dari pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga-lembaga yang juga memiliki perhatian terhadap konservasi keanekaragaman hayati.

Maka dari itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan eksploitasi trenggiling yang masih terjadi, kemudian menganalisisnya menggunakan analisis yang lebih mendalam, sehingga dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang lebih bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait dan berwenang untuk kebijakan yang lebih baik kedepannya.